



Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Tanjung Lesung dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Firman Hidayat^{1*}, Wahyu Widodo², Endayani³

¹⁻³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Penulis Korespondensi: firmahy43@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the Regional Government's strategy in developing the Tanjung Lesung Tourism Area and identify obstacles and efforts to improve the community's economy. As a Special Economic Zone (SEZ) and a national priority tourism destination, Tanjung Lesung has great potential in encouraging local growth, but its development still faces challenges. The research uses a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation studies with informants from the Tourism Office, SEZ managers, MSME actors, and Pokdarwis. The analysis refers to the theory of Suryadana's tourism development strategy, including attractions, accessibility, amenities, and institutions. The results of the study show that the government's strategy focuses on the development of attractions through the involvement of MSMEs and cultural preservation, as well as improving facilities with training and community assistance. This strategy has a positive impact on increasing income and job creation. However, there are obstacles in the form of limited regional authority in SEZ management, lack of optimal accessibility and infrastructure, weak collaboration between stakeholders, low capacity of local human resources, and inconsistent promotion. The government's efforts include increasing human resource capacity, facilitating MSMEs in events, and cross-sector coordination. In conclusion, the Tanjung Lesung tourism development strategy has contributed to economic empowerment, but it is not optimal, so stronger synergy is needed between the government, the private sector, and the community to realize sustainable tourism.*

Keywords: *Development Strategy, Community Economy, Tourism, Tanjung Lesung, Community Empowerment.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Kawasan Wisata Tanjung Lesung serta mengidentifikasi hambatan dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan destinasi pariwisata prioritas nasional, Tanjung Lesung memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan lokal, namun pengembangannya masih menghadapi tantangan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari Dinas Pariwisata, pengelola KEK, pelaku UMKM, dan Pokdarwis. Analisis mengacu pada teori strategi pengembangan pariwisata Suryadana, meliputi atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan strategi pemerintah berfokus pada pengembangan atraksi melalui pelibatan UMKM dan pelestarian budaya, serta peningkatan fasilitas dengan pelatihan dan pendampingan masyarakat. Strategi ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan KEK, kurang optimalnya aksesibilitas dan infrastruktur, lemahnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan, kapasitas SDM lokal yang rendah, serta promosi yang belum konsisten. Upaya pemerintah meliputi peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi UMKM dalam event, dan koordinasi lintas sektor. Kesimpulannya, strategi pengembangan wisata Tanjung Lesung telah memberikan kontribusi bagi pemberdayaan ekonomi, tetapi belum optimal sehingga diperlukan sinergi lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi Pengembangan, Ekonomi Masyarakat, Pariwisata, Tanjung Lesung, Pemberdayaan Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga memiliki efek terhadap masyarakat setempat. Menurut Suwantoro dalam penelitian Afyiah (2024) wisata alam adalah jenis wisata yang memanfaatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam. Obyek dan kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan ekosistem dan sumber daya alam, baik dalam keadaan aslinya (alami) dan

ketika dikombinasikan dengan unsur-unsur buatan manusia, dikategorikan sebagai pariwisata alam. Akibatnya, area rekreasi outdoor yang alami dan mampu memberikan kenyamanan hal itu dapat menambah tingkat kunjungan (wisatawan). Kabupaten Pandeglang yang terletak di Provinsi Banten, memiliki beragam potensi wisata alam yang cantik.

Daerah ini menampilkan keindahan alam yang meliputi pesisir, Kawasan perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Terdapat desa-desa di wilayah ini yang berupa pulau-pulau kecil, melayang di permukaan laut, menawarkan panorama yang memukau. Destinasi wisata di Pandeglang mencakup berbagai jenis, seperti wisata bahari, pegunungan, airterjun, sejarah, budaya, dan edukasi. Tanjung Lesung memiliki tingkat jumlah pengunjung yang terus meningkat secara signifikan (Bappeda, 2017) dalam penelitian (Afiyah, 2024).

Salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Pandeglang yang menjadi salah satu tujuan utama wisatawan adalah Kawasan wisata Tanjung Lesung. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung berada di Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada tanggal 23 Februari 2015 kawasan wisata KEK Tanjung Lesung diresmikan, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung memiliki luas sektor wisata yaitu mencakup 1.500 Ha. Dalam arus globalisasi yang semakin kuat di era saat ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Salah satu contoh yang menonjol adalah kawasan wisata Tanjung Lesung yang terletak di Kabupaten Pandeglang. Destinasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Tanjung Lesung yang terletak di Pulau Jawa merupakan bagian penting bagi kawasan Banten terkhususnya di Kabupaten Pandeglang dengan karakter daratannya yang luar biasa menjadi daya tarik tersendiri. Pada tahun 2018, tsunami melanda Pesisir Teluk Selat Sunda di Provinsi Banten, menghancurkan industri pariwisata secara fisik, finansial, dan investasi. Kerusakan parah terjadi di Tanjung Lesung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan tujuan wisata populer.

Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung terus meningkat setiap tahunnya. Pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya strategi pengembangan yang mampu meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat setempat, kurangnya perhatian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, lemahnya promosi atau pemasaran, rendahnya kapasitas

sumber daya manusia lokal, serta belum terintegrasinya pengembangan wisata dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus penelitian ini yaitu pada analisis strategi pengembangan kawasan wisata yang mencakup perencanaan, implementasi, serta bentuk intervensi Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam membangun dan mengelola potensi pariwisata di Tanjung Lesung. Penelitian ini melihat bagaimana strategi tersebut menyentuh aspek-aspek penting seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, kolaborasi dengan sektor swasta, dan promosi wisata.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

John Friedman (1994) dalam penelitian (Lomboan et al., 2021) menjelaskan dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama (*Enabling*), menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena yang demikian akan punah.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua (*empowering*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dalam rangka diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkahlangkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi. Ketiga (*protecting*), memperdayakan masyarakat mengandung arti melindungi. Perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi artinya mengisolasi dari interaksi, melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*Charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha sendiri, dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan

masyarakat memungkinkan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Menurut (Hasbi dkk., 2022) dalam penelitian (Kurniati Fitri et al., 2023) Maksud dari pemberdayaan adalah kondisi atau hasil yang ingin dicapai melalui suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, berdaya guna, berdaya pengetahuan, dan mampu memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosialnya, meliputi percaya diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mampu mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses multidimensi dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian dan daya saing, serta mengelola dan mengembangkan potensinya sendiri. Pemberdayaan ini mencakup tiga aspek utama, yang pertama yaitu mendorong pengembangan potensi masyarakat (aktivasi), meningkatkan kapasitas dan akses terhadap sumber daya dan peluang (izin), dan memastikan partisipasi masyarakat tanpa batas untuk menghindari marginalisasi dalam proses pembangunan (perlindungan). Strategi pemberdayaan difokuskan pada pelibatan masyarakat secara proaktif di setiap tahap pembangunan. Ini termasuk mengintegrasikan perencanaan, melakukan penilaian, mengembangkan sumber daya manusia, dan pembangunan fisik.

Dalam lingkup ini, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi penggerak utama ekonomi lokal, menjadi sangat penting karena memungkinkan mereka untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata dianggap sebagai alat yang efektif untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Asalkan memberikan manfaat langsung, termasuk manfaat partisipatif dan berbasis masyarakat. Semua upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keberhasilan dan menciptakan kegiatan yang sederhana, lugas, dan adil yang berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

Strategi Pengembangan Pariwisata

Menurut Barreto, M dan Ketut G (2015) Strategi adalah bagaimana suatu organisasi mengidentifikasi suatu kondisi yang dapat berpeluang memberikan keuntungan terbaik dan membantu mencapai tujuan yang diharapkan untuk meningkatkan kompetensi dan mencapai keunggulan bersaing (Maulidiya & Hayati, 2020)

Pitana (2015) mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu wilayah atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan sesuatu yang baru. Dengan demikian pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Hasil penelitian Sabon et al. (2018) dalam Martoyo et al., (2022) menyatakan bahwa daya tarik pengunjung ke destinasi wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor: ketepatan strategi promosi, strategi pendanaan, strategi pembangunan infrastruktur, dan kebijakan sektor pariwisata oleh pemerintah. Daftar prioritas destinasi wisata yang telah dikembangkan dan memberikan hasil positif adalah: KEK Tanjung Lesung, Gunung Bromo, Pulau Morotai, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang dan Borobudur, Mandalika, Wakatobi, dan Labuan Bajo.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 dalam Ellitan (2009) tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait.

Menurut Suryadana (2015) dalam penelitian Bagaihing et al., (2022) menjelaskan beberapa komponen dasar pariwisata yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Komponen tersebut antara lain:

Daya Tarik (*Attraction*)

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Indikatornya adalah: a). *Something to See* adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata, b). *Something to Do* adalah agar wisatawan bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, dan relax, c). *Something to Buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.

Aksesibilitas (*Accessibilities*)

Dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah mencapai tempat wisata tersebut. Objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Indikatornya adalah: Jalan raya, sistem telekomunikasi, transportasi, pelayanan (pos penjaga objek wisata, pusat informasi).

Fasilitas (*Amenities*)

Fasilitas yang tersedia di daerah objek wisata seperti akomodasi dan restoran. Fasilitas menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata (DTW).

Dengan adanya fasilitas, maka wisatawan dapat tinggal lebih lama di daerah tersebut. Indikatornya adalah: a). Fasilitas penginaptn (hotel, *villa*, pondok, restoran), b). Fasilitas kamar mandi umum, c). Fasilitas parkir.

Lembaga Pengelola (*Institutions*)

Aspek berikut ini mengacu kepada adanya lembaga atau organisasi yang mengolah objek wisata tersebut. Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan kenyamanan (*Protection of Tourism*) dan terlindungi baik melaporkan maupun mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung atau orang yang bepergian. Indikatornya adalah: a). Pihak Pemerintah, b). Pihak Swasta, c). Investor

Dalam teori strategi pengembangan pariwisata yang membahas teori yang relevan, mulai dari definisi hingga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu destinasi wisata. Beberapa ahli seperti Pitana, Swarbrooke, Syamsu, dan lainnya memberikan perspektif tentang pentingnya perencanaan yang terintegrasi, riset pasar, promosi, pemberdayaan masyarakat, serta peran kebijakan Pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Suryadana sebagai landasan, karena teori tersebut menyajikan pendekatan yang komprehensif terhadap pengembangan pariwisata melalui empat komponen utama, yaitu daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, dan lembaga pengelola, yang secara keseluruhan mencerminkan faktor-faktor penting dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan dan menarik bagi wisatawan.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi-strategi yang diterapkan dalam pengembangan pariwisata Tanjung Lesung serta bagaimana strategi tersebut berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel lain Sugiyono (2009:11) dalam Asriandy (2016). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan kondisi, situasi, dan fenomena secara menyeluruh melalui pengumpulan data dari narasumber yang berkompeten. Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini secara khusus berfokus pada strategi pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat lokal. Fokus ini dipilih karena kawasan wisata Tanjung Lesung yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyimpan potensi besar, baik dari aspek sumber daya alam, posisi geografis strategis, maupun dukungan regulasi pemerintah pusat dan daerah.

Fokus Penelitian

Dalam konteks tersebut, fokus utama penelitian dapat dirinci menjadi dua aspek kunci, yaitu: a). Analisis strategi pengembangan kawasan wisata yang mencakup perencanaan, implementasi, serta bentuk intervensi Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam membangun dan mengelola potensi pariwisata di Tanjung Lesung. Penelitian ini melihat bagaimana strategi tersebut menyentuh aspek-aspek penting seperti peningkatan infrastruktur, promosi wisata, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan kolaborasi dengan sektor swasta, b). Evaluasi dampak strategi pengembangan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat lokal, yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam sektor wisata, peningkatan pendapatan rumah tangga, penyerapan tenaga kerja, serta pembentukan usaha kecil dan menengah berbasis pariwisata.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas strategi formal dari pemerintah, tetapi juga menekankan pada efektivitas dan keberlanjutan dampak ekonomi dari strategi tersebut terhadap masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Teknik Pengambilan Data

Dalam pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data menjadi tahapan krusial untuk menggali pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan tiga teknik utama untuk memperoleh data, yaitu:

Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan jawaban yang luas dan reflektif, Fokus wawancarana yaitu meliputi: a. Strategi dan kebijakan pengembangan pariwisata;

b. Keterlibatan masyarakat dalam sektor wisata; c. Evaluasi dampak ekonomi dari pengembangan wisata, d. Kendala yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata

Observasi Partisipatif Peneliti melakukan observasi langsung ke kawasan wisata Tanjung Lesung untuk melihat kondisi faktual di lapangan. Observasi ini mencakup: a. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata (akses jalan, akomodasi, fasilitas publik); b. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata (warung, penginapan, jasa pemandu wisata, dll.); c. Interaksi antara pelaku wisata dan wisatawan; d. Aktivitas Dinas Pariwisata dalam promosi dan pengembangan destinasi Observasi dilakukan secara berulang dan mendalam untuk menangkap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak dapat ditangkap hanya melalui wawancara atau dokumen.

Studi Dokumentasi Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis seperti: a. Dokumen perencanaan dan laporan kegiatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; b. Peraturan daerah terkait KEK Tanjung Lesung; c. Statistik kunjungan wisatawan dari tahun 2018–2023; d. Data sosial ekonomi masyarakat sekitar; e. Artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan berita dari media lokal. Dokumentasi ini memberikan konteks tambahan dan pembandingan terhadap temuan dari wawancara dan observasi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, yang berada di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Peneliti memilih lokasi ini karena Tanjung Lesung merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat strategis dan sedang dalam proses pengembangan oleh Pemerintah. Kawasan ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan April hingga Juli 2025. Rentang waktu tersebut mencakup tahap observasi awal, wawancara mendalam dengan informan, dokumentasi lapangan, serta proses analisis informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan dengan merujuk pada teori Strategi Pengembangan Pariwisata yang dikemukakan oleh Suryadana, yang mencakup empat indikator utama, yaitu: daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, dan lembaga pengelola. Masing-masing indikator dijadikan acuan dalam menyusun pertanyaan wawancara serta mengkategorikan jawaban yang diperoleh dari narasumber. Dengan menggunakan teori tersebut sebagai kerangka

analisis, hasil wawancara ini diolah dan disajikan secara sistematis agar mampu menggambarkan strategi-strategi yang telah, sedang, dan akan diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan kawasan wisata Tanjung Lesung, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan pembangunan daerah secara umum.

Daya Tarik Wisata

Kawasan Tanjung Lesung saat ini dikelola dan dievaluasi oleh pihak swasta, yaitu PT Banten West Java, karena status kepemilikannya bukan di bawah pemerintah daerah. Meski demikian, Dinas Pariwisata tetap berperan melalui strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat sekitar, seperti pembinaan pedagang, peningkatan keamanan kawasan, hingga pendampingan terhadap petugas P3K dan ASN. Dinas juga mendorong seluruh perusahaan swasta di kawasan ini untuk mengurus izin resmi ke Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai bentuk legalitas dan agar mereka berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak usaha, misalnya saat perusahaan mendirikan hotel, mereka wajib memiliki IMB karena sifatnya komersial.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan keragaman daya tarik wisata, Dinas Pariwisata menekankan pentingnya pelayanan dan kenyamanan, karena kedua hal ini menjadi penentu utama daya tarik menurut wisatawan. Keterlibatan masyarakat lokal juga diperkuat, khususnya melalui partisipasi dalam atraksi kesenian daerah seperti pencak silat dan ubrug yang rutin ditampilkan saat event resmi atau peresmian hotel, sebagai upaya promosi budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan UMKM juga didukung penuh oleh dinas melalui promosi dan pembinaan, di antaranya dengan melibatkan produk lokal dalam event-event pariwisata seperti fun run, bekerja sama dengan pokdarwis dan swasta, serta memberikan bimbingan teknis seperti pelatihan packaging dan proses pengurusan HAKI.

Aksesibilitas

Aksesibilitas menuju Tanjung Lesung saat ini tergolong cukup baik dari sisi infrastruktur jalan, namun masih dihadapkan pada tantangan kurangnya penerangan jalan umum (PJU) yang berisiko terhadap keamanan, seperti kecelakaan dan tindak kriminal. Meskipun pembangunan jalan bukan menjadi kewenangan utama Dinas Pariwisata, dinas tetap berperan melalui rencana strategis jangka panjang seperti menyediakan bus pariwisata keliling agar mobilitas wisatawan lebih mudah, yang diharapkan bisa berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Sayangnya, rencana tersebut belum terealisasi karena keterbatasan anggaran, meskipun telah diajukan ke Pemerintah provinsi dan pusat. Untuk transportasi umum, saat ini akses menuju kawasan sudah terlayani oleh bus Damri.

Peningkatan akses jalan juga melibatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terutama dalam pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang yang menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di mana proyek ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR, sedangkan Pemerintah daerah mendukung dalam proses pengusulan dan sinkronisasi kebijakan.

Fasilitas Pendukung

Dalam rangka menyiapkan fasilitas penunjang di kawasan Tanjung Lesung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melatih sekitar 40 pengelola homestay di sekitar KEK, termasuk melakukan kunjungan simulasi ke Villa Kalicaa agar standar layanan dan kualitas kamar sesuai dengan harapan wisatawan. Pasca-tsunami, fasilitas umum seperti radar deteksi tsunami, alat peringatan dini (EEWS), jalan, ATM, toilet, klinik, musholla, WiFi, dan tempat parkir dibangun dan diperbaiki melalui kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BMKG, dan Pemerintah daerah. Layanan darurat juga diperkuat dengan pembentukan Tourism Crisis Center (TCC) oleh Kementerian Pariwisata dan Basarnas yang bekerja sama dengan pengelola KEK, untuk memastikan kesiapsiagaan melalui pemantauan jaringan, posko evakuasi, dan sistem darurat lainnya. Pengembangan fasilitas juga menerapkan standar kualitas, seperti pelatihan homestay yang mengacu pada standar PHRI yang meliputi kualitas pelayanan, keramahan, dan manajemen usaha.

Dalam jangka panjang, KEK merencanakan pembangunan 26 akomodasi seperti hotel, resort, dan kondominium dari berbagai kategori, serta mendapatkan dukungan insentif fiskal dan kemudahan perizinan untuk menjamin kualitas layanan. Peran investor swasta sangat krusial dalam penyediaan fasilitas wisata, di mana PT Banten West Java sebagai anak perusahaan Jababeka berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan akomodasi. Pemerintah pusat dan daerah juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk menarik investasi, sementara Disparbud turut mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan fasilitas tersebut. Sejauh ini, fasilitas yang tersedia telah mampu mendukung kenyamanan dan keamanan wisatawan, di mana beberapa infrastruktur yang sempat rusak akibat tsunami kini sudah pulih, aksesibilitas semakin baik dengan perbaikan jalan nasional dan rencana pembangunan bandara dan stasiun kereta api, serta hadirnya pusat informasi, klinik, dan jalur evakuasi yang dilengkapi sistem peringatan dini, sehingga wisatawan bisa menikmati fasilitas seperti homestay dan resort dengan pelayanan dan kenyamanan yang terus ditingkatkan.

Lembaga Pengelola

Pengelolaan Kawasan Tanjung Lesung melibatkan berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pariwisata, serta pihak swasta dan investor utama. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Dinas Pariwisata secara rutin menjalin koordinasi dengan lembaga terkait, misalnya dengan mengundang PHRI dalam rapat persiapan menjelang musim liburan guna membahas strategi keamanan dan 64 kenyamanan pengunjung. Selain itu, pembentukan kelembagaan berbasis masyarakat juga telah berjalan, seperti kolaborasi antara pengelola hotel dan PHRI, serta pembinaan dan pengarahan untuk menyamakan visi pengelolaan destinasi secara berkelanjutan dan profesional.

Strategi pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah mengarah pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pelibatan aktif dalam UMKM, pelestarian budaya lokal, promosi digital, dan promosi wisata berbasis komunitas. Namun, masih terdapat hambatan struktural dalam bentuk minimnya aksesibilitas, keterbatasan kewenangan terhadap kawasan KEK, dan belum optimalnya kolaborasi kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi pengembangan wisata tidak hanya cukup dengan perencanaan program, tetapi harus ditunjang dengan sinergi kelembagaan yang kuat dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan.

Pengembangan kawasan wisata, seperti yang diterapkan di Tanjung Lesung, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, dengan fokus pada empat indikator utama dalam teori Suryadana (2019), yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, dan lembaga pengelola. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan UMKM, pengembangan atraksi kesenian lokal, dan dukungan terhadap produk lokal, yang bertujuan tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal (Wibowo & Setiawan, 2020; Jusuf & Zubair, 2021). Selain itu, kualitas pelayanan dan kenyamanan wisatawan juga ditekankan sebagai faktor utama dalam menarik pengunjung (Pramudita & Prasetyo, 2019), dan Dinas Pariwisata memfokuskan upaya tersebut melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan pembinaan pelaku usaha untuk mengurus izin usaha yang sah, yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan legalitas usaha. Pemberdayaan ekonomi lokal ini juga didukung dengan pelatihan dan bimbingan teknis, seperti pengurusan HAKI untuk UMKM, yang semakin memperkuat daya saing produk lokal di pasar pariwisata (Mulyani & Purnomo, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, strategi pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang meliputi pengembangan daya tarik wisata melalui pelestarian alam, wisata bahari, penguatan atraksi budaya lokal, serta peningkatan kualitas SDM dengan pembinaan dan pelatihan, termasuk dukungan bagi UMKM dalam promosi produk, pelatihan packaging, dan pengurusan HAKI. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan jalan dan infrastruktur dasar, menyediakan fasilitas penunjang wisata seperti akomodasi, toilet, tempat parkir, dan kawasan UMKM, serta memperkuat kelembagaan pengelola dengan melibatkan kerja sama antara Dinas Pariwisata, pengelola KEK, dan pelaku usaha. Dengan strategi pengembangan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan, Tanjung Lesung berpotensi menjadi ikon pariwisata Banten sekaligus motor penggerak peningkatan ekonomi masyarakat Pandeglang, di mana kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan mewujudkan kawasan wisata yang unggul, kompetitif, dan berkeadilan. Dalam upaya mewujudkan pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, Pemerintah Daerah dihadapkan pada sejumlah hambatan yang bersifat struktural, teknis, hingga sosial.

Hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan strategi pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang antara lain keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan KEK Tanjung Lesung karena pengelolaan berada di bawah kendali PT Banten West Java sehingga pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan penuh, kurangnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang menyebabkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata, rendahnya kapasitas dan literasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata terutama pada aspek pelayanan, digital marketing, pengemasan produk, dan pengelolaan usaha, strategi promosi yang tidak berkelanjutan dan belum terintegrasi sehingga eksistensi Tanjung Lesung masih kurang dikenal di tingkat nasional maupun internasional, ketimpangan manfaat ekonomi yang lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar sementara masyarakat lokal hanya memperoleh penghasilan dari sektor informal, serta keterbatasan anggaran daerah yang menghambat kontinuitas program pemberdayaan masyarakat dan memperkecil cakupan wilayah binaan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan seperti tata boga, pemandu wisata, tata graha (housekeeping), dan bahasa asing agar masyarakat siap terlibat secara profesional dalam dunia pariwisata; pemberdayaan UMKM lokal melalui pendampingan, pelatihan pengemasan produk, promosi digital, serta fasilitasi perizinan dan hak kekayaan intelektual (HAKI) agar produk lokal lebih berdaya saing; fasilitasi partisipasi pelaku usaha lokal dalam event wisata seperti festival budaya dan kegiatan olahraga pariwisata sebagai ajang promosi sekaligus penciptaan jejaring pasar; penguatan promosi berbasis digital melalui media sosial dan pengembangan konten terpadu yang menargetkan wisatawan nusantara maupun mancanegara; koordinasi lintas sektor dengan instansi provinsi dan pusat guna mendorong pembangunan infrastruktur strategis seperti akses jalan, penerangan, dan transportasi publik; kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pihak swasta dalam bentuk program magang, riset, pelatihan, serta pengembangan ekosistem wisata berbasis inovasi dan akademik; serta penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) untuk menciptakan kesamaan persepsi dan kolaborasi optimal. Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Daerah berharap pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan merata bagi masyarakat lokal serta mendorong terciptanya kawasan wisata yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mensupport dan mendo'akan di setiap langkah dan perjalanan saya, termasuk dalam pengerjaan skripsi saya sehingga skripsi ini telah selesai meskipun banyak kesulitan, cobaan dan banyak mengeluh. saya sadar dalam Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sempurna hanya milik Allah Swt. untuk itu kepada pembaca Skripsi/Jurnal saya memohon maaf sebesar-besarnya, Saya harap skripsi/jurnal saya bermanfaat untuk banyak orang.

DAFTAR REFERENSI

- Afiyah, S. A. (2024). Analisis potensi dan pengembangan wisata kawasan ekonomi. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29170.07361>
- Asriandy, I. (2016). Strategi pengembangan obyek wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng (Skripsi, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin. <https://core.ac.uk/download/pdf/77625485.pdf>
- Bagaihing, M., Mantolas, C. M., & Nugraha, Y. E. (2022). Strategi pengembangan Pantai Nimtuka sebagai potensi wisata berbasis masyarakat di Desa Bone Kabupaten Kupang. *Jurnal Tourism*, 5(2), 95–104.
- Fadilah, S. (2021). Sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web pada sekolah menengah pertama. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta Press.
- Hadi, S. P., & Iskandar, M. (2022). Penerapan sistem informasi perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas layanan di sekolah menengah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6(2), 123–132.
- Kurniati Fitri, Z. A., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2023). Development of a tourism village efforts to empower the community's economy from an Islamic economic perspective: A case study of West Lombok's Kebon Ayu. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(1), 115–123. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).115-123](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).115-123)
- Kurniawan, R. D. (2020). Aplikasi sistem pengelolaan perpustakaan berbasis desktop. Bandung: PT Informatika Utama.
- Lomboan, D. V. Y., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), 28.
- Martoyo, A., Wiliani, N., & Basri, H. (2022). Strategi promosi desa wisata Tanjungjaya KEK Tanjung Lesung melalui platform digital. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(2), 971–987. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i2.136>
- Maulidiya, L., & Hayati, M. (2020). Potensi dan strategi pengembangan pariwisata di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang. *Agriscience*, 1(2), 507–529. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v1i2.9183>
- Nasution, M., & Suryani, F. (2021). Pengembangan aplikasi perpustakaan sekolah berbasis komputer untuk mempermudah layanan peminjaman dan pengembalian buku. *Jurnal Teknologi Informasi*, 5(3), 45–56.
- Pitana, I. G. (2015). Sosiologi kepariwisataan: Konsep dan perkembangan.
- Sari, Y. A. (2022). Perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web untuk sekolah menengah. Yogyakarta: Pustaka Cendekia.
- Suryadana, M., & Octavia, V. (2015). Pengantar pemasaran pariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pub. L.
No. 10, 19 (2009).